

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. SAJIAN DATA**

Pada bab III ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari proses penelitian mengenai strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY. Data yang disajikan berupa hasil wawancara dari pihak informan dan juga data dokumen atau kepustakaan yang diperoleh dari pihak BPBD DIY. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada pada bab I.

Hasil penelitian yang diperoleh merupakan gabungan dari data primer dan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dan juga masyarakat DIY yang pernah mengikuti seminar kebencanaan yang diselenggarakan oleh pihak BPBD. Sedangkan data sekunder merupakan data dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan untuk mendukung penelitian ini.

#### **1. Perencanaan Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Dalam melakukan strategi komunikasi haruslah melakukan perencanaan komunikasi. Seperti halnya yang dilakukan BPBD DIY dalam upaya menyusun strategi komunikasi dalam upaya mitigasi bencana yang ada di DIY. Perencanaan komunikasi yang dilakukan BPBD DIY meliputi:

- a. Pengenalan Situasi

Dalam penyusunan program suatu organisasi atau instansi pemerintah maupun swasta haruslah melakukan beberapa analisis situasi. Dalam hal ini BPBD melakukan pengenalan situasi berdasarkan kejadian dan kerentanan bencana disuatu wilayah seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S.PT selaku seksi pencegahan BPBD DIY berikut ini:

Pengenalan situasi yang kita gunakan adalah dengan cara melihat peta kerawanan bencana (analisa risiko) dan (penilaian risiko) di suatu wilayah. Di DIY sendiri potensi bencana gempa bumi sangat tinggi dengan tingkat kerawannya cukup tinggi. Di seluruh wilayah DIY merupakan wilayah terpapar gempa bumi. Maka dari itu kita buat program berdasarkan wilayah potensi bencana. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

Menurut data dari BPBD, analisa bencana dibentuk melalui proses identifikasi dari ancaman bencana yang ada disetiap daerah rawan. Analisa ini disusun dengan pertimbangan berikut ini :

- 1) Identifikasi tipe ancaman dilakukan dengan menggunakan data kejadian bencana yang pernah terjadi di masa lampau.
- 2) Pemberian jumlah dan penaksiran dari bahaya/ancaman dari setiap daerah rawan bencana. Setiap daerah akan diberi nilai berdasarkan ancaman/bahaya kemudian diolah untuk memastikan secara pasti seberapa besar ancaman di daerah tersebut.
- 3) Analisa Probalitas (kemungkinan terjadi bencana) dinilai dengan menggunakan skala berikut :
  - a) 5 Kemungkinan sangat besar (80-99% hampir dipastikan)
  - b) 4 Kemungkinan besar (60-80% terjadi atau paling tidak terjadi sekali dalam 10 tahun mendatang)
  - c) 3 Mungkin terjadi (40-60 % terjadi atau paling tidak terjadi sekali dalam 100 tahun mendatang )

- d) 2 Kemungkinan kecil (20-40% terjadi atau paling terjadi dalam lebih dari 100 tahun )
  - e) 1 Kemungkinan sangat kecil (hingga 20 %)
- 4) Analisa dampak kerugian dinilai dengan menggunakan skala berikut:
- a) 5 Sangat tinggi (80-99% daerah hancur dan daerah lumpuh total)
  - b) 4 Tinggi (60-80 % daerah hancur)
  - c) 3 Sedang (40-60% daerah hancur )
  - d) 2 Rendah (20-40% daerah rusak)
  - e) 1 Sangat rendah ( kurang dari 20% daerah rusak)

Sumber : Data BPBD DIY 2018

Didalam menganalisa risiko bencana BPBD DIY didukung alat yang bernama *Early Warning System* (EWS) yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa tingkat risiko bencana di suatu daerah secara lebih akurat. Alat ini juga berfungsi sebagai peringatan dini untuk memberitahukan jika terjadi bencana tsunami. Kemudian saat ini masih dikembangkan alat yang bernama *Disaster Information Management System* (DIMS). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Supardi ,S.PT selaku seksi pencegahan berikut ini:

Kita menganalisa risiko bencana menggunakan alat yang bernama *Early Warning System* (EWS) untuk menganalisa tingkat risiko bencana secara lebih akurat. Tapi saat ini kita juga baru mengembangkan alat bernama *Disaster Information Management System* (DIMS) untuk pemutakhirannya. Jadi beda EWS dengan DIMS adalah kalau EWS masih manual sedangkan DIMS sudah tersistem (wawancara seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

Gambar 3. Gambar pemetaan analisa bencana DIY



Tabel 18. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Di Yogyakarta

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAAPAR	KELOMPOK KUMUH BERTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. BANJIR	2.964.112	479.813	711.176	13.991	TINGGI
2. BANJIR SANGAT	38.105	6.490	11.297	206	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	3.527.609	504.685	904.225	20.634	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	400.776	68.405	109.905	1.910	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	4.041	729	1.330	39	TINGGI
6. GEMPABUMI	3.676.677	613.121	957.148	21.692	TINGGI
7. KERACAKAN BAHAN DAN LARAN	-	-	-	-	-
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	42.206	9.392	12.406	193	TINGGI
9. KEKERINGAN	3.677.245	612.866	956.715	21.687	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	54.250	8.190	9.059	276	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	346.384	30.729	58.823	1.403	TINGGI
12. TSUNAMI	48.271	8.687	13.054	489	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Sumber : BPBD DIY 2018

b. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan dilakukan untuk mempermudah perencanaan pembuatan program komunikasi yang akan dijalankan. Secara umum tujuan yang akan dicapai BPBD DIY selaku badan yang bertugas menanggulangi masalah bencana di Indonesia adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S.Pt berikut ini :

BPBD memiliki 2 target yaitu meliputi target pengurangan dan juga target penambahan atau peningkatan. Target pengurangan meliputi : kurangi kematian akibat bencana, kurangi jumlah masyarakat terdampak, kurangi kerugian ekonomi akibat bencana dan kurangi kerusakan infrastruktur yang bisa terdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian target penambahan atau peningkatan meliputi : penambahan jumlah negara peduli pengurangan risiko bencana (PRB) ditingkat nasional dan daerah tahun 2020, peningkatan kerjasama internasional dan penambahan *early warning system* multi bencana juga informasi risiko dan kajian bencana. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

Tujuan tersebut kemudian dipersempit kembali untuk memudahkan membuat suatu program yaitu mendorong terwujudnya masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana dengan melibatkan bagian-bagian dari masyarakat melalui program pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana (DESTANA) dan pembentukan serta pengembangan sekolah aman bencana (SSB). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S. Pt berikut ini :

Kita mengacu pada regulasi yang dibentuk oleh pemerintah didalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJNAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam membuat strategi dan tujuan. Dari hasil regulasi tersebut kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang salah satunya berisi penguatan kesiapsiagaan dalam semua tingkatan masyarakat, mengembangkan sistem informasi manajemen sumberdaya penanggulangan bencana , mengkampanyekan budaya sadar bencana, membentuk dan mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pendidikan. Maka dari itu kita fokuskan terlebih dahulu untuk mempersiapkan masyarakat tangguh bencana mulai dari level pemerintahan yang paling kecil yaitu desa/kelurahan tangguh bencana dan membentuk sekolah siaga bencana.(wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

c. Definisi Khalayak

Penentuan khalayak yang jelas akan mempermudah dalam memilih media sebagai sarana pencapaian pesan. Khalayak dapat dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, gaya hidup, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. BPBD menentukan khalayak berdasarkan analisis risiko dengan melakukan perhitungan analisis komponen bahaya dan komponen kerentanan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S. Pt berikut ini :

Didalam membuat definisi khalayak kita masih berpatokan pada analisis risiko tadi. Dalam melakukan analisis resiko banyak cara yang bisa dilakukan seperti misalnya analisis manfaat biaya, analisis dampak dan model kegagalan, analisis kuantitatif, pemetaan risiko dan pemetaan ancaman bencana. Dari semua unsur tadi kemudian kita hitung risiko bencana yang akan terjadi termasuk membuat komponen bahaya dan komponen kerentanan. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

Gambar 4. Komponen Bahaya dan Komponen Kerentanan

**Tabel 18. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi DI Yogyakarta**

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. BANJIR	2.964.112	479.815	711.176	15.991	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	38.105	6.490	11.397	206	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	3.527.404	584.685	904.225	20.404	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	400.776	68.405	109.905	1.918	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	4.041	720	1.330	39	TINGGI
6. GEMPABUMI	3.678.677	613.121	957.148	21.692	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	62.206	9.392	12.406	193	TINGGI
9. KECERINGAN	3.677.245	612.066	956.715	21.687	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	54.258	8.180	9.054	276	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	166.384	30.729	56.023	1.403	TINGGI
12. TSUNAMI	48.271	8.687	15.654	484	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 20. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAJAR	KELAS KEBUGHAAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 48. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. BANJIR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Sumber : BPBD DIY 2018

#### d. Pemilihan Media

Media adalah alat untuk menyampaikan informasi/pesan dari komunikator kepada komunikan. Media mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Didalam pemilihan media tersebut BPBD DIY mempunyai berbagai bentuk media komunikasi yang digunakan. Media tersebut dibagi berdasarkan tujuan yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S.PT berikut ini :

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat , kita mempunyai media yang bermacam-macam. Tergantung tujuan apa yang ingin kita targetkan. Seperti seumpama kita mempunyai akun twitter yang dimana disitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan kegiatan kita, kemudian ada lagi baliho dan poster itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada

masyarakat yang pesannya lebih ringan. Ada juga leflet yang kita bagikan kepada masyarakat ketika kita mengadakan seminar kebencanaan. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

Didalam penggunaan media, BPBD membagi berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

1) Media Umum

Media Umum yang digunakan BPBD DIY meliputi telepon, facsimile.

2) Media Cetak

Media cetak yang digunakan oleh BPBD meliputi poster.

Gambar 5. Poster BPBD



Sumber : BPBD DIY 2018

3) Media elektronik

Media elektronik digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya untuk menjangkau penyampaian informasi secara luas dengan menggunakan internet dan media sosial meliputi Twitter dan website.



Gambar 6. Media elektronik BPBD



Sumber : Website BPBD dan Twitter BPBD 2018

4) Media luar ruang

Media luar ruang ditempatkan ditempat yang strategis agar masyarakat melihat dan mampu menangkap isi pesan yang ada pada media tersebut meliputi baliho.

Gambar 7. Media luar ruang BPBD DIY

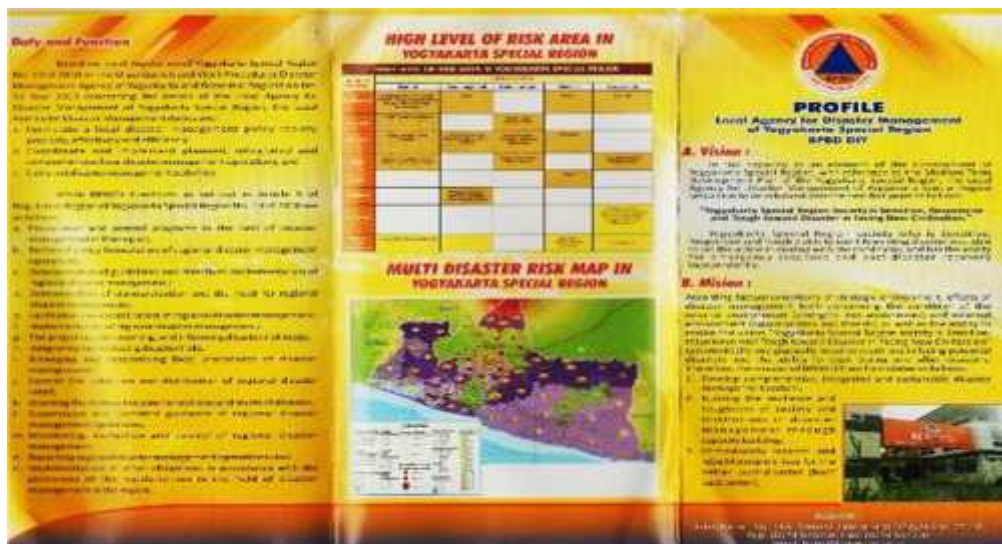


Sumber : Dokumen pribadi peneliti 2018

5) *Printed Materials*

Digunakan untuk mendukung penyampaian pesan pada saat seminar kebencanaan dan penyuluhan. Meliputi pamflet, leaflet dan stiker.

Gambar 8. Pamflet dan Buku Saku BPBD DIY





Sumber : BPBD DIY 2018

6) *Spoken and visual word*

Meliputi radio komunikasi yang terintergrasi untuk berkoordinasi dengan BPBD wilayah kabupaten/kota.

Gambar 9. Radio Komunikasi BPBD



Sumber : BPBD DIY 2018

7) Media Pertemuan

Untuk mengedukasi masyarakat terdampak bencana dalam persiapan dan pencegahan serta penanggulangan masalah bencana. Meliputi Seminar kebencanaan dan penyuluhan.

Gambar 10. Media Pertemuan yang dilakukan BPBD DIY





Sumber : BPBD DIY 2018

e. Mengatur Anggaran

Pengaturan anggaran dilakukan untuk mengetahui berapa banyak dana yang harus dikeluarkan dalam membiayai suatu program yang akan dijalankan. BPBD selaku instansi pemerintah yang ditugaskan dan diberikan amanat oleh negara untuk menanggulangi masalah bencana mempunyai anggaran biaya yang didapatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini BPBD memiliki kewenangan untuk mendapatkan dana dari APBD untuk anggaran program dan penanggulangan serta dalam sebuah pembiayaan suatu program komunikasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Supardi S.PT berikut ini :

Biaya untuk menjalankan suatu program diambil dari APBD DIY. Kita sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menanggulangi masalah bencana sepenuhnya mengikuti aturan dari pemerintah. Tugas ini diputuskan oleh DPRD provinsi untuk kemudian mengalokasikan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk program yang akan kita jalankan. Anggaran itu kemudian dialokasikan untuk membiayai program dan juga untuk keperluan yang lain semisal untuk perawatan armada dan alat-alat dan perlengkapan penanggulangan bencana. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

f. Evaluasi Hasil Kegiatan

Setelah program disusun dengan baik dan program telah dilaksanakan, maka kemudian hal yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi kegiatan untuk mengetahui apakah program itu mengalami kegagalan atau mengalami keberhasilan. Setelah melaksanakan program yang dijalankan, BPBD DIY melakukan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan dari program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Dari hasil evaluasi tersebut, BPBD memiliki ukuran tingkat keberhasilan meliputi:

- 1) Tahu.
- 2) Paham.
- 3) Siap.
- 4) Sadar.
- 5) Sudah Berbudaya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Ade Permata Sari S.T selaku bagian Pencegahan yang menjabat sebagai Pengelola Kelembagaan berikut ini :

Dari upaya mitigasi yang kita lakukan, kita mempunyai program yang kita jalankan seperti pembentukan DESTANA dan SSB. Dari hasil program yang kita jalankan tersebut kemudian ada monitoring evaluasi yang kita lakukan. Monitoring evaluasi tersebut kemudian kita mendapatkan hasil apakah program kita sudah tercapai atau belum. Kita mempunyai tingkatan dari mulai Tahu, Paham, Siap, Sadar dan Sudah Berbudaya. Dari sanalah kita bisa melihat apakah desa/sekolah yang kita programkan hanya sekedar Tahu, Paham, Siap, Sadar,

atau malah Sudah Berbudaya dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di daerah mereka. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

Dalam melakukan program tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa belum semua desa/sekolah telah berhasil di tingkat Berbudaya seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan adanya banyak faktor seperti dari BPBD ataupun masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini :

Dari beberapa desa belum semua ada ditingkat Sudah Berbudaya dalam menghadapi bencana, hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti dari kita yang kurang dalam menyampaikan informasi ataupun karena masyarakat sendiri yang kurang memahami bahwa tempat tinggal mereka adalah tempat rawan bencana. Bahkan ada beberapa kasus bahwa dari kita menilai disuatu daerah itu dari segi masyarakat sudah Sadar terhadap bencana, tapi ternyata pada kenyataannya masyarakat di desa tersebut hanya ada di tingkat Paham. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

Maka dari itu pihak BPBD DIY kemudian menjadikan monitoring evaluasi tersebut untuk kemudian menjadi bahan perbaikan pada pembentukan program di tahun depan. Karena pembentukan program merupakan agenda yang dilaksanakan setiap tahun dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2022. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Dari hasil monitoring evaluasi inilah kemudian tahu apa saja yang perlu diperbaiki untuk menyiapkan masyarakat Sudah Berbudaya terhadap bencana yang akan mereka hadapi sewaktu-waktu. Untuk itu kita kaji lebih lanjut supaya kita bisa memperbaiki untuk melaksanakan program tahun depan. karena program yang akan kita laksanakan untuk pembentukan DESTANA dan SSB sampai dengan tahun 2022 yang dimulai dari tahun 2012. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

2. Penetapan Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY

Setelah melakukan perencanaan komunikasi, tahap selanjutnya yang dilakukan BPBD DIY adalah melakukan dan menetapkan Strategi komunikasi yang akan dijalankan. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:

a. Menetapkan dan menentukan komunikator

Pada proses komunikasi perlu adanya sumber informasi. BPBD selaku badan yang mempunyai peran penting dalam mempersiapkan masyarakat yang tangguh untuk menghadapi masalah bencana yang akan terjadi selalu mempersiapkan sumber/komunikator yang tepat agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Kita biasanya berkoordinasi dengan BMKG sebagai ahli untuk memberikan pengetahuan yang lebih terhadap bencana kepada masyarakat. Dan juga tokoh masyarakat seperti halnya kepala desa ataupun tokoh yang *dituakan* dimasyarakat sebagai upaya menjalin komunikasi yang efektif kepada masyarakat. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

b. Menyusun pesan

Pesan yang disampaikan oleh BPBD biasanya berupa materi yang disampaikan oleh komunikator dan juga materi yang dibuat melalui *power point* saat Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) serta berupa pamflet yang dibagikan untuk mendukung materi yang disampaikan dalam upaya mitigasi bencana. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini :

Pesan yang kita sampaikan dalam Rakornis biasanya berbentuk materi materi tentang bencana yang disampaikan langsung oleh komunikator tersebut. Juga biasanya kita buat *power point* untuk memperjelas lagi materi yang kita sampaikan. Bahkan juga kita bagikan pamflet tentang bencana untuk mendukung materi yang kita sampaikan kepada masyarakat. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).



c. Memproduksi media

Dalam memproduksi media BPBD bekerjasama dengan pihak yang dirasa ahli dalam membuat media tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Dalam pembuatan media kita biasanya bekerjasama dengan pihak desain grafis seperti contohnya pembuatan pamflet dan juga leaflet. Karena kita belum punya seorang teknisi desain grafis. Atau kadang juga kita buat semacam perlombaan desain yang dibuat untuk umum untuk mengikut sertakan masyarakat dan juga mahasiswa contohnya supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menghadapi risiko bencana melalui desain grafis. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

d. *Pretesting communication*

BPBD tidak melakukan pengujian media komunikasi yang mereka buat dikarenakan dalam pembuatan desain mereka bekerjasama dengan pihak desain grafis yang dirasa ahli. Hanya saja pihak BPBD ikut memantau pembuatan desainya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T selaku bagian Pencegahan yang menjabat sebagai Pengelola Kelembagaan berikut ini:

Kalo untuk pengujian media seperti pamflet, poster atau yang lain kita tidak melakukannya. Karena yang membuat desain itu sendiri adalah pihak ahli yang bisa dibidang pekerjaan sehari-hari mereka. Mungkin untuk pengujiannya cuma dari kita sendiri. Ketika dirasa desainya sudah sesuai kita *publish* ke masyarakat. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

e. Penyebar luasan media

Menyebarkan media komunikasi yang sudah dibuat bertujuan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat diterima oleh target sasaran. Hal ini juga dilakukan BPBD DIY dalam upaya penyebaran media yang mereka buat untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan BPBD dalam penyebaran media yaitu :

- 1) Poster, pamflet dan buku saku

Media cetak berupa poster, pamflet dan buku saku biasanya dibagikan pada saat melakukan seminar kebencanaan atau penyuluhan untuk mendukung materi yang diberikan. Media seperti poster juga disebar melalui internet khususnya twitter BPBD DIY untuk menjangkau target sasaran yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan Bapak Budi Supardi S.PT berikut ini:

Poster, pamflet, stiker ataupun buku saku biasanya kita bagikan kepada peserta saat seminar kebencanaan maupun penyuluhan untuk mendukung materi yang kita berikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas materi, karena kadang masyarakat lebih mengerti ketika kita sajikan gambar-gambar yang menarik daripada menerima pengetahuan bencana dari materi yang kita bawa secara lisan. Dan poster juga biasanya kita unggah ke akun twitter kita, yang disitu diharapkan dapat dilihat oleh masyarakat secara luas. (Wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

## 2) Baliho

Media baliho digunakan untuk menjangkau target sasaran yang ada di daerah sekitar. Penggunaan media baliho oleh BPBD DIY terkendala masalah pembiayaan pajak pemasangan. Jadi baliho yang dipasang hanya bertahan satu kali kontrak pemasangan saja. Selanjutnya baliho yang saat ini masih terpasang hanya ada di depan kantor BPBD DIY yang ada di Jalan Kenari No.14A, Semaki Umbulharjo Yogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budi Supardi S.PT berikut ini:

Untuk media baliho kita terkendala masalah biaya pajak pemasangan, karena anggaran tidak ada anggaran untuk biaya pajak pemasangan baliho itu sendiri. Karena anggaran yang ada kita khususkan untuk upaya upaya mitigasi dan program DESTANA maupun SSB juga untuk pemeliharaan alat dan juga kendaraan operasional yang ada. Baliho yang masih terpasang tinggal di depan kantor itu. (Wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY, 23 Oktober 2018)

## 3) Twitter dan web

Media internet yang digunakan BPBD DIY digunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. Media yang digunakan meliputi twitter dan web. Media tersebut digunakan untuk memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPBD DIY.

Namun belum semua masyarakat khususnya wilayah DIY mengetahui twitter BPBD DIY. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit Nur Cahyo berikut ini :

Saya belum tahu kalo BPBD DIY menggunakan twitter untuk media sosialisasi. Yang saya tahu BPBD menggunakan cara sosialisasi pertemuan seperti ini saja. Kalo untuk website saya tau, hanya saja saya tidak terlalu sering memantau website BPBD DIY. (Wawancara dengan masyarakat kabupaten Bantul 20 November 2018)

f. Pengaruh (effect) yang diharapkan

Setelah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pihak BPBD DIY melakukan tahapan evaluasi. Dari hasil evaluasi inilah terdapat 5 ukuran tingkat keberhasilan yaitu meliputi :

- 1) Tahu.
- 2) Paham.
- 3) Siap.
- 4) Sadar.
- 5) Sudah Berbudaya.

Dari ukuran tingkat keberhasilan tersebut diharapkan bahwa sikap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana mampu menjadi masyarakat yang sudah berbudaya terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dilingkungan mereka.

Pengaruh dan efek inilah yang juga dirasakan terhadap masyarakat yang telah melakukan kegiatan rakornis tersebut. Seperti halnya yang dirasakan oleh saudara Sigit Nur Cahyo sebagai peserta kegiatan Rakornis yang diadakan oleh BPBD.

Sebelum mengikuti acara seperti ini saya tahunya cuman di daerah saya rawan terhadap bencana saja. Belum mengerti bagaimana bencana itu khususnya gempa bumi dan tsunami bisa terjadi dan bagaimana yang seharusnya saya lakukan jika bencana itu terjadi. Setelah saya mengikuti setidaknya 12 hari dalam kegiatan Rakornis ini saya akhirnya tahu bagaimana harus menyikapi dan bertindak saat bencana itu terjadi dan pasca bencana itu terjadi. (wawancara dengan peserta Rakornis 20 November 2018)

g. Mobilisasi sumberdaya luar

Untuk menggerakkan atau memobilisasi masyarakat BPBD DIY mengajak seorang tokoh masyarakat yang dituakan seperti misalnya Ketua RT, kepala Dukuh dan Lurah/ Camat. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini :

Kita biasanya berkoordinasi dengan BMKG sebagai ahli untuk memberikan pengetahuan yang lebih terhadap bencana kepada masyarakat. Dan juga tokoh masyarakat seperti halnya kepala desa ataupun tokoh yang *dituakan* dimasyarakat sebagai upaya menjalin komunikasi yang efektif kepada masyarakat. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

Didalam melakukan kegiatan penyuluhan, Pihak BPBD melakukan komunikasi 2 arah melalui tanya jawab ketika melakukan penyuluhan kebencanaan. Pertanyaan mengenai apa yang belum diketahui masyarakat tentang bencana dan juga menyiapkan kuis berhadiah seputar materi yang telah diberikan untuk upaya mobilisasi masyarakat khususnya peserta penyuluhan.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Dalam melakukan kegiatan penyuluhan kita biasanya memberikan waktu kepada peserta seminar untuk memberikan pertanyaan tentang apa saja yang belum mereka ketahui tentang masalah bencana ataupun cara untuk melakukan

evakuasi. Lebih lanjutnya kita juga menyiapkan kuis dengan hadiah di akhir kegiatan untuk menumbuhkan respon positif dari peserta kegiatan. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

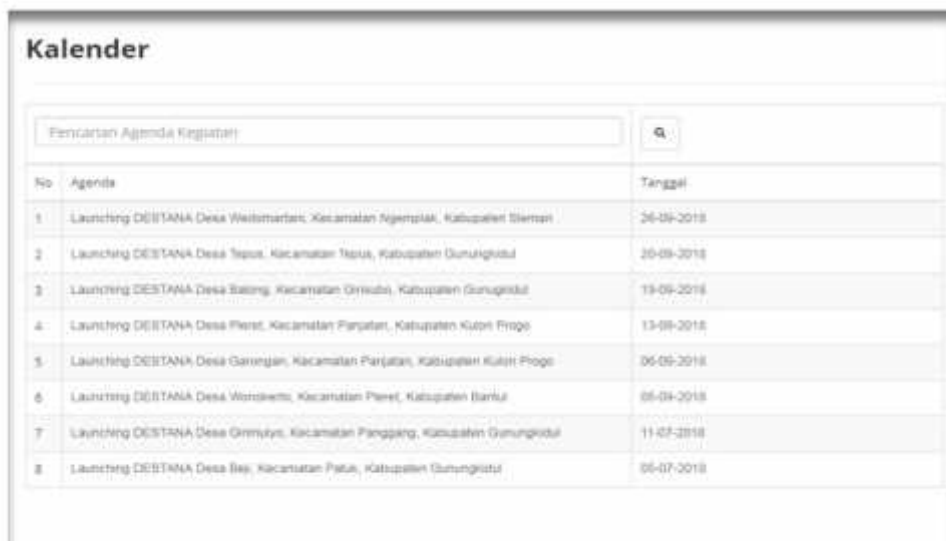
Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Hartoyo selaku peserta seminar berikut ini:

Kegiatan Rakornis untuk membentuk masyarakat yang tangguh terhadap bencana ini lebih membuka pengetahuan saya terhadap ancaman bencana yang akan terjadi di daerah ini. Apalagi mengenai bagaimana cara untuk melakukan evakuasi saat terjadinya bencana dan seperti apa cara menanganinya. Cara untuk menyampaikan informasinya pun bagus, dari mulai penjelasan materi, sesi tanya jawab, sampai ada kuis yang bisa menambahkan minat dalam mengikuti seminar ini (wawancara dengan peserta Rakornis 20 November 2018).

h. Penyusunan jadwal kegiatan

Dalam melaksanakan program, BPBD menyusun jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Jadwal tersebut meliputi jadwal kegiatan rakornis dan juga jadwal peresmian DESTANA maupun SSB. Seperti yang ada pada gambar jadwal kegiatan berikut.

Gambar 11. Jadwal kegiatan BPBD DIY 2018



No	Agenda	Tanggal
1	Launching DESTANA Desa Welismartan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman	26-09-2018
2	Launching DESTANA Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul	20-09-2018
3	Launching DESTANA Desa Saling, Kecamatan Orkidu, Kabupaten Gunungkidul	19-09-2018
4	Launching DESTANA Desa Peret, Kecamatan Parjatan, Kabupaten Kulon Progo	13-09-2018
5	Launching DESTANA Desa Garingan, Kecamatan Parjatan, Kabupaten Kulon Progo	05-09-2018
6	Launching DESTANA Desa Wondikem, Kecamatan Peret, Kabupaten Bantul	06-09-2018
7	Launching DESTANA Desa Orkidu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul	11-07-2018
8	Launching DESTANA Desa Raj, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul	06-07-2018

Sumber : BPBD DIY 2018

i. Mempersiapkan Tim kerja

Untuk mendukung pelaksanaan program agar berjalan efektif dan lancar, BPBD DIY mempersiapkan tim untuk melaksanakan program tersebut. Didalam pelaksanaan program DESTANA dan SSB menjadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dibantu oleh seksi-seksi dan juga ahli. Sedangkan untuk ahli itu sendiri BPBD DIY bekerjasama dengan BMKG maupun ahli-ahli terkait masalah bencana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade Permata Sari,S.T berikut ini :

Biasanya untuk pelaksanaan program DESTANA dan SSB menjadi tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dibantu oleh seksi-seksi,pihak terkait seperti TNI/Polri,SAR, dan juga pihak-pihak ahli . Untuk ahli sendiri biasanya kita bekerjasama dengan BMKG. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

3. Kegiatan Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY

Didalam upaya penanggulangan bencana, BPBD DIY melakukan tindakan sesuai dengan amanat yang di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kegiatan-kegiatan manajemen bencana yang dilakukan BPBD DIY meliputi :

a. Pencegahan

Beberapa cara Pencegahan yang dilakukan BPBD adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan hidup tertib dan disiplin serta memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Dari upaya Pencegahan inilah kemudian

masyarakat dituntut untuk tidak membakar hutan yang akan berakibat pada polusi dan terjadinya tanah longsor ataupun tidak membuang sampah ke sungai yang akan berakibat banjir. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap bencana. Yaitu dengan berbentuk fisik dan non-fisik atau materi. Fisik itu sendiri misalnya mendirikan pos peringatan bencana. Sedangkan non-fisik atau materi misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan hidup tertib dan disiplin tentang aturan dan juga memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Dari upaya pencegahan non-fisik inilah kemudian diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai misalnya. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

Gambar 12. Peresmian pendirian pos peringatan bencana dan tempat evakuasi



Sumber : BPBD DIY 2018

#### b. Mitigasi

Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa program yang dijalankan oleh BPBD DIY selaku badan yang menangani masalah bencana adalah dengan melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Level pemerintahan yang paling terkecil adalah

Desa/Kelurahan maka dari itu BPBD menargetkan Desa/Kelurahan dalam upaya tangguh menghadapi bencana.

Dalam upaya mitigasi BPBD DIY membagi menjadi 2 bentuk mitigasi yaitu:

1) Mitigasi Struktural

Yaitu bentuk atau upaya meminimalisir risiko bencana berupa fisik seperti contoh pembangunan bendungan , tanggul , pemasangan tanda-tanda bahaya, ataupun pemasangan tanda jalur-jalur evakuasi.

2) Mitigasi nonstruktural

Yaitu bentuk atau upaya meminimalisir risiko bencana berupa non fisik seperti contoh peraturan perundang-undangan, pelatihan ataupun pendidikan tentang bencana.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini:

Didalam mitigasi Struktural kita membangun seperti contohnya bendungan, atau plakat-plakat tentang rawan bencana dan juga plakat-plakat jalur evakuasi. Kemudian mitigasi nonstuktural atau non fisiknya kita buat kegiatan yang kita beri nama Rakornis (Rapat Koordinasi Kronis) yaitu sebuah kegiatan sebagai sarana mitigasi dimana didalam kegiatan itu meliputi penyuluhan, pelatihan, upaya mandiri dan juga pengetahuan terhadap bencana dan bagaimana melakukan tindakan yang benar. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

Dalam upaya pembentukan program mitigasi inilah BPBD kemudian membuat suatu kegiatan Rakornis yang dilakukan selama 12 kali pertemuan dan didalamnya terdapat kegiatan penyuluhan, pelatihan menangani bencana, upaya mandiri dan juga pembekalan pengetahuan mengenai bencana serta bagaimana melakukan tindakan yang benar disaat bencana dan pascabencana.

Gambar 13. Pelatihan Mitigasi penanganan korban bencana.





Sumber : BPBD DIY 2018

c. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat. Kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD adalah dengan penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan yang kita lakukan seperti misalnya penyiapan sarana komunikasi seperti radio komunikasi yang selalu kita pantau untuk selalu mengabarkan situasi terkini kepada pihak BNPB ataupun ke BPBD kabupaten ataupun dengan instansi-instansi terkait. Tak hanya itu saja, dari mulai menyiapkan pos komando, mempersiapkan lokasi evakuasi hingga menyosialisasikan pedoman penanggulangan bencana menjadi salah satu kesiapsiagaan bencana yang harus kita lakukan. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

d. Peringatan Dini

Peringatan dini yang dilakukan BPBD DIY di bantu dengan alat yang disebut Early Warning System (EWS) yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. EWS yang terpasang di daerah rawan bencana kemudian mengirimkan sinyal kepada BPBD DIY jika sewaktu-waktu akan terjadi bencana. EWS memberikan sinyal bencana seperti gunung meletus, tanah longsor dan juga Tsunami. Namun Tidak semua bencana mempunyai sistem peringatan dini. Salah satu bencana yang tidak memiliki sistem peringatan dini adalah bencana gempa bumi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T berikut ini :

Kita memiliki alat yang bernama Early Warning System (EWS), alat ini digunakan selain untuk menganalisis risiko daerah bencana juga sebagai alat peringatan dini ketika terjadi bencana, seperti misalnya gunung meletus, atau gelombang Tsunami. Dari alat ini selanjutnya kita melakukan evakuasi kepada masyarakat dan juga menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dari ancaman bencana yang dikirimkan sinyal tersebut. Namun tidak semua bencana bisa di deteksi. Gempa bumi adalah salah satu bencana yang tidak mempunyai sistem peringatan dini. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018).

e. Tanggap Darurat

Tanggap darurat menurut seksi pencegahan BPBD DIY Ibu Ade Permata Sari S.T adalah upaya yang dilakukan sesegera mungkin pada saat terjadinya sebuah bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Pada periode krisis ini hal yang dilakukan berupa penyelamatan korban dan evakuasi. Proses ini adalah yang terpenting mengingat pada tahap ini adalah tahap yang krusial dan harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar dapat meminimalisir hal buruk yang timbul akibat bencana.

Tanggap darurat itu sendiri merupakan bentuk atau upaya yang dilakukan sesegera mungkin pada saat terjadinya sebuah bencana untuk meminimalisir dan mengevakuasi korban dari terjadinya bencana itu sendiri. Dalam hal ini BPBD DIY bekerjasama dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan juga BPBD kabupaten serta instansi terkait supaya evakuasi korban bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

f. Bantuan Darurat

Pada saat upaya tanggap darurat tidak dapat terlepas dari bantuan darurat.

Hal yang dibutuhkan para korban di area pengungsian menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Mengingat kebutuhan dasar manusia menjadi hal yang pokok untuk keberlangsungan hidup bagi para korban bencana itu sendiri.

Penyiapan bantuan darurat itu sendiri meliputi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Bantuan darurat adalah hal yang harus diperhatikan setelah proses tanggap darurat dilaksanakan, hal tersebut harus kita persiapkan untuk keberlangsungan hidup korban bencana di area pengungsian. Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, air bersih dan juga sanitasi adalah hal yang paling utama kita siapkan untuk korban yang berada di pengungsian. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

g. Pemulihan

Setelah kebutuhan bagi para korban bencana dipengungsian telah terpenuhi, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah proses pemulihan dan rehabilitasi terhadap daerah yang terkena bencana. Pada tahapan pemulihan ini adalah dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana seperti pada keadaan semula. Upaya yang dapat dilakukan seperti misalnya perbaikan akses jalan, listrik, air dan lain-lain.

Tahapan pemulihan dan rehabilitasi adalah tahapan yang dilakukan setelah bantuan darurat telah sepenuhnya dilaksanakan. Pada kegiatan manajemen bencana ini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan pada tahap ini adalah tahap peralihan periode bencana ke periode pascabencana dimana pada tahapan ini pula kehidupan yang tadinya lumpuh akibat terjadinya bencana,

dipulihkan kembali seperti keadaan semula sebelum bencana. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

#### h. Rehabilitasi

Tak jauh berbeda dengan tahapan pemulihan, ditahap rehabilitasi adalah tahapan yang diambil setelah terjadinya bencana. Tahapan yang berfokus kepada pembangunan mental dan juga pembangunan infrastruktur setelah kejadian bencana untuk menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat pascabencana.

#### i. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan program jangka panjang untuk memperbaiki fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pascabencana. Dalam hal pengendalian bencana dan tahapan penanggulangan bencana diperlukan adanya kesadaran kritis masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk membentuk kesadaran masyarakat terdampak bencana dan juga meminimalisir korban jiwa ataupun harta benda saat terjadinya bencana. Hal yang dilakukan antara lain membentuk peraturan daerah mengenai manajemen bencana. Tak hanya itu saja , rekonstruksi yang dilakukan BPBD DIY juga berupaya melakukan sosialisasi kehati-hatian terutama kepada masyarakat yang bermukim ditempat rawan bencana.

Rekonstruksi merupakan program jangka panjang untuk mempersiapkan masyarakat tangguh terhadap bencana, maka dari itu pemerintah membentuk peraturan mengenai manajemen bencana seperti Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJNAS) ditingkat Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditingkat Daerah. Disitu disusun regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah untuk membentuk suatu sistem manajemen bencana. Dari situlah kemudian muncul gagasan mengenai strategi yang akan digunakan BPBD DIY untuk menanggulangi bencana alam. (wawancara dengan seksi pencegahan BPBD DIY 19 November 2018)

## **B. PEMBAHASAN**

Setelah melakukan penyajian data pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data yang telah peneliti dapatkan tersebut dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan didalam kerangka teori bab I.

### **1. Perencanaan Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan langkah-langkah yang digunakan oleh pihak BPBD DIY untuk menyusun strategi yang akan dilakukan dalam upaya mitigasi risiko bencana gempa bumi. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang dilakukan BPBD dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pencapaian keberhasilan strategi tersebut. Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan keseluruhan data mulai dari pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media, mengatur anggaran hingga evaluasi hasil kegiatan. Menurut Anggoro (2002 : 77-96) perencanaan komunikasi adalah tahapan dalam menyusun strategi komunikasi. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

#### **a. Pengenalan Situasi**

Pengenalan situasi merupakan tahapan yang sebaiknya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melihat tingkat risiko bencana yang ada pada setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk memetakan beberapa tingkat kerawanan bencana dari satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Bapak Budi Supardi S.Pt dalam tahapan pengenalan situasi ini BPBD DIY melakukan beberapa hal diantaranya menganalisis situasi dengan cara melihat faktor-faktor tingkat risiko bencana di suatu daerah tersebut. Analisis risiko ini menggunakan alat yang bernama *Early Warning System* yang kemudian

diperbaharui menjadi *Disaster Information Management System* untuk menghitung analisis risiko bencana secara lebih akurat. Adapun yang dimaksud dengan *Early Warning System* meliputi alat alat pendeteksi bencana, pemetaan daerah rawan bencana dan pemetaan penduduk terpapar di suatu daerah bencana. Seluruh data yang ada dalam EWS ini didapatkan secara manual selanjutnya untuk memudahkan dalam tahapan pengenalan situasi BPBD DIY melakukan pembaharuan sistem berbentuk *Disaster Information Management System* dimana dalam sistem tersebut informasi yang didapatkan terkordinasi menjadi satu sistem informasi.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengemukakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh BPBD DIY sudah tepat dikarenakan pembaharuan sistem yang dilakukan dengan metode satu sistem memudahkan untuk tahapan awal terhadap upaya mitigasi bencana di DIY. Serta telah sesuai dengan pendapat Khambali (2017 : 24) yang mengemukakan bahwa analisis risiko bencana sebagai metodologi dalam menentukan risiko melalui suatu analisis ancaman bencana dan evaluasi terhadap kondisi eksisting. Selanjutnya ditambahkan beberapa metode yang dapat digunakan seperti:

- 1) Analisis manfaat biaya

Analisis manfaat biaya adalah metode yang digunakan untuk memilih suatu opsi dengan cara memberi keseimbangan antara biaya setiap opsi dengan keuntungan/kelebihannya. Dengan adanya pembaharuan sistem yang dilakukan oleh BPBD DIY dalam menganalisis situasi tersebut, analisis

biaya dapat dilihat seberapa besar keberhasilan dalam menjalankan suatu program yang dilakukan.

2) Analisis dampak dan model kegagalan

Analisis dampak dan model kegagalan merupakan teknik analisis yang mendeskripsikan dampak dari suatu kegagalan pada suatu sistem. Hal ini dapat digunakan oleh BPBD DIY dalam menguji *Disaster Information Management System* untuk melihat keakuratan dalam menganalisis situasi risiko bencana yang ada di DIY.

3) Analisis kuantitatif

Analisis yang bergantung pada keakuratan dan kelengkapan indikator serta metode yang digunakan oleh BPBD DIY terhadap upaya mitigasi bencana.

4) Pemetaan risiko

Gambaran suatu masyarakat dalam suatu wilayah geografis yang mengidentifikasi tempat atau wilayah yang mungkin terkena dampak suatu bencana.

5) Pemetaan ancaman bencana.

Pemetaan ancaman adalah proses yang dilakukan untuk memetakan bencana pada suatu wilayah dengan berbagai skala peta, penutupan lahan, dan detail lainnya.

Metode inilah yang digunakan BPBD dalam menganalisis situasi risiko bencana yang ada di DIY.

b. Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan dilakukan untuk mempermudah perencanaan pembuatan program komunikasi yang akan dijalankan. Tujuan yang terlalu umum kemudian dipersempit untuk mempermudah membuat suatu program.

Dari hasil wawancara yang telah di bahas di dalam sajian data sebelumnya, bahwa BPBD DIY menetapkan tujuan atau target umum yang akan dilakukan. Target tersebut dijelaskan dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 3.1 Target umum BPBD DIY

Target Pengurangan	Target Penambahan/Peningkatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi kematian akibat bencana</li> <li>- Mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak bencana</li> <li>- Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana</li> <li>- Mengurangi kerusakan infrastruktur yang bisa terdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan jumlah negara peduli pengurangan risiko bencana ditingkat nasional dan daerah tahun 2020</li> <li>- Peningkatan kersama internasional</li> <li>- Penambahan early warning system multi bencana, informasi risiko dan kajian bencana</li> </ul>

Dari target yang masih umum tersebut, kemudian BPBD DIY mempersempit kembali target tersebut untuk mempermudah membuat suatu program. Target yang dibuat mengacu kepada regulasi yang dibentuk pemerintah yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJNAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalam RPJNAS dan RPJMD tersebut kemudian muncul kebijakan-kebijakan untuk membuat acuan pembentukan strategi yang akan dibuat oleh BPBD DIY. Persempitan target adalah dengan mempersiapkan masyarakat dari level pemerintahan terkecil yaitu desa atau kelurahan tangguh bencana (DESTANA) dan juga sekolah siaga bencana (SSB).



Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BPBD telah melakukan penetapan tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Anggoro (2002 : 77-96) namun untuk pelaksanaannya belum semua desa/kecamatan dan juga sekolah tersentuh program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Permata Sari S.T bahwa program DESTANA dan SSB merupakan program jangka panjang yang dibuat dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2022 mendatang. Hal ini menjadi perhatian lebih oleh pihak BPBD DIY untuk segera mungkin melakukan program tersebut khususnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di seluruh desa/kecamatan yang ada di DIY mengingat ancaman bencana khususnya gempa bumi menjadi salah satu bencana yang berpotensi terjadi di semua wilayah di DIY. Seperti yang dikatakan Lestari (2011 : 88-91) bahwa komunikasi bencana merupakan sebuah proses pengaturan penanggulangan bencana berdasarkan unsur-unsur komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah ,pendonor dan lembaga swadaya masyarakat. Semakin sering koordinasi penanggulangan bencana dilakukan, maka risiko kerugian yang ditimbulkan akibat bencana akan semakin kecil. Selanjutnya Lestari Lestari (2011 : 88-91) menambahkan bahwa koordinasi memerlukan :

- 1) Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik.
- 2) Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi.
- 3) Sumberdaya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan.
- 4) Jalanya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

c. Definisi Khalayak

Tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah mendefinisikan khalayak. Menurut Manase Mallo (1986 : 150) menentukan khalayak adalah menentukan

target yang menjadi sasaran program komunikasi, dikarenakan memiliki kepentingan organisasi maupun karena khalayak tersebut merupakan objek utama dalam proses komunikasi. Selanjutnya Cangara (2013 : 112) menjelaskan bahwa ada tiga cara yang bisa digunakan untuk memetakan karakteristik masyarakat, yakni :

- 1) Aspek sosiodemografik, mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkat pendapatan (*income*), agama, ideologi, etnis, termasuk pemilikan media.
- 2) Aspek profil psikologis, mencakup sikap yang tercermin dari kejiwaan masyarakat, misalnya temperamen, tenang, sabar, terbuka, emosional, tidak sabar dan lain-lain.
- 3) Aspek karakteristik perilaku masyarakat, mencakup kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan suatu masyarakat. Misalnya, agamis, santun, suka pesata atau mabuk-mabukan, serba perhitungan, boros dan lain-lain.

Yang menjadi sasaran komunikasi BPBD DIY adalah seluruh masyarakat DIY yang ada pada wilayah rawan bencana. Dalam mendefinisikan khalayak BPBD DIY menggunakan analisis risiko bencana dengan melakukan perhitungan analisa komponen bahaya dan komponen kerentanan. Menurut penjelasan dari Bapak Budi Supardi S.T setelah menghitung dengan analisa komponen bahaya dan komponen kerentanan dapat dilihat berapa besar faktor risiko yang dihadapi oleh masyarakat disuatu wilayah yang rentan terhadap bencana. Analisa komponen bahaya dan komponen kerentanan tersebut meliputi tingkat kerawanan bencana, jumlah penduduk, jumlah kepadatan penduduk yang terancam dan presentase daerah terbangun (bangunan pemukiman).

Dari hasil penelitian tersebut, dalam melakukan definisi khalayak BPBD DIY menggunakan Aspek sosiodemografik untuk menghitung berapa jumlah penduduk terpapar bencana yang didalamnya terdapat usia dan jenis kelamin masyarakat yang terpapar bencana. Namun untuk Aspek profil psikologis yang mencakup sikap yang tercermin dari perilaku masyarakat dan aspek karakteristik perilaku masyarakat yang mencakup kebiasaan kebiasaan yang dijalani dilingkungan masyarakat tidak dilakukan oleh BPBD dalam mendefinisikan khalayak. Hal tersebut dikarenakan dalam mengidentifikasi khalayak BPBD masih menggunakan sistem *early warning system* yang ada pada analisis risiko bencana. Sehingga dalam menentukan khalayak tersebut masih menggunakan sistem yang sama dengan analisis situasi.

d. Pemilihan Media

Media merupakan sarana dalam penyampaian informasi. Pemilihan media yang tepat dapat penyampaian pesan yang efektif. Menurut Turnomo (2012 : 9) Media adalah sebuah organisasi yang kompleks, sebuah institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Jelasnya, media adalah pemain utama (*major player*) dalam perjuangan ideologi. Jika dikelola secara benar, terbuka dan bebas, maka media akan bisa menjadi ruang publik, ruang yang memungkinkan warga dapat melaksanakan dialog dalam kesetaraan. Riswandi (2009:160) menjelaskan pemilihan media komunikasi seharusnya dilakukan paling tidak atas dua pertimbangan yaitu : Pertimbangan mengenai karakteristik media dan Pertimbangan yang menyangkut kreatif (isi dan teknis penyajian pesan).

Media yang digunakan BPBD DIY meliputi :

- 1) Media Umum : Telepon dan facsimile

Media telfon digunakan BPBD DIY agar penyampaian pesan dan tujuan kepada sasaran berjalan secara lebih efektif. Peneliti mengungkapkan media umum yang digunakan oleh BPBD sudah tepat dikarenakan dengan menggunakan media umum seperti telepon, pesan maupun informasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Lebih lanjut Widjadja (1993 : 79) menjelaskan dengan menggunakan telepon waktu penyampaian pesan lebih cepat, tidak takut hilang ditengah jalan, dan dapat berbicara secara langsung dengan pendengarnya, hingga kalau kurang jelas dapat minta diulangi lagi.

## 2) Media Cetak : Poster, pamflet dan buku saku

Dalam memproduksi media cetak BPBD melakukan kerjasama dengan pihak luar (dalam hal ini seorang ahli desain grafis) untuk membuat desain yang menarik. Menurut peneliti langkah yang diambil BPBD sudah tepat, dikarenakan dalam membuat media seperti poster, pamflet ataupun buku saku haruslah menarik agar menambah minat baca masyarakat untuk melihat dan menerima pesan yang ingin disampaikan. Seperti yang dikatakan Cangara (2013:136) bahwa untuk memproduksi media format kecil bisa dilakukan dengan memesan pada percetakan atau perusahaan-perusahaan periklanan lainnya.

Media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh BPBD DIY telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ruslan (2000 : 29-31) yaitu media seperti poster, pamflet, dan buku saku merupakan

media yang berbentuk *printed material* untuk menyampaikan sebuah informasi.

### 3) Media Baliho

Media baliho yang digunakan BPBD DIY digunakan untuk menjangkau masyarakat disekitar. Namun terdapat kendala dimana anggaran dalam pemasangan dan pajak baliho tidak ada didalam anggaran pembiayaan komunikasi. Anggaran biaya lebih difokuskan untuk pelaksanaan program DESTANA, SSB, dan pemeliharaan alat. Baliho yang masih terpasangpun hanya ada didepan kantor BPBD DIY dengan keadaan yang sudah tidak dapat terlihat secara jelas. Baliho yang digunakan BPBD perlu diperbaiki dan diperbaharui dikarenakan baliho tersebut sudah tidak dapat terlihat secara jelas maksud dan gambar visualisasinya. Serta anggaran untuk pemasangan baliho ditambah lagi agar penyampaian informasi terhadap bencana melalui media baliho dapat berjalan dengan maksimal. Cangara (2013 :136) juga menjelaskan untuk media luar ruang sedapat mungkin menggunakan foto yang *close-up* dan tidak memuat banyak tulisan, sebab media seperti ini tujuannya hanya untuk mengingatkan orang pada program yang dipromosikan.

### 4) *Spoken and visual word* : Radio komunikasi

Radio komunikasi digunakan untuk mengkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat dalam koordinasi BPBD tiap daerah dan juga BNPB.

Hal yang dilakukan BPBD DIY sudah tepat karena telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang diatur oleh Undang-Undang dan juga pedoman pelaksanaan radio komunikasi

BNPB. Salah satu upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menguatkan jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan pada Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi/kabupaten/kota menggunakan radio komunikasi. Hal ini bertujuan agar pertukaran informasi kebencanaan dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mendukung penanggulangan bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013 : 1)

5) Media Internet dan sosial media : Twitter dan web

Media internet yang dilakukan BPBD dalam menyampaikan pesan komunikasi adalah melalui twitter dan web. Dari hasil wawancara oleh Bapak Budi Supardi S.T menjelaskan bahwa twitter dan web BPBD DIY dipergunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.

Didalam menggunakan media khususnya internet peneliti melihat penggunaan media twitter dan web belum cukup untuk dapat menyampaikan informasi dengan jangkauan yang lebih luas. Kemajuan teknologi dan juga makin banyaknya media sosial yang marak pada *era-modern* ini seharusnya lebih dapat dimaksimalkan oleh pihak BPBD DIY dalam menyebarkan informasi-informasi terkait masalah bencana dimasyarakat. Ditambah penjelasan oleh Bapak Sigit Nur Cahyo sebagai peserta rakornis dan masyarakat DIY yang belum mengetahui adanya media twitter sebagai sarana informasi BPBD DIY memperkuat bahwa media twitter yang digunakan oleh BPBD belum terlalu efektif di masyarakat.

6) Media Pertemuan

Media pertemuan yang dilakukan BPBD DIY dalam hal ini adalah saat melakukan kegiatan rakornis yang diadakan pada saat pembentukan DESTANA dan SSB yang ada di desa/kelurahan dan juga sekolah yang menjadi sasaran program. Dalam kegiatan tersebut dilakukan selama 12 kali pertemuan dengan membawakan materi-materi tentang mitigasi dan penanggulangan bencana. BPBD DIY juga menyampaikan pesan-pesan yang bersifat persuasif yang diharapkan mampu mempengaruhi sikap masyarakat untuk siap dalam menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dilatih dalam penanganan bencana seperti misalnya evakuasi dan lain-lain. Dengan diadakannya rakornis ini diharapkan masyarakat menjadi lebih siap dan juga sudah berbudaya terhadap ancaman bencana yang akan terjadi.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengungkapkan apa yang dilakukan BPBD sudah sangat tepat. Dikarenakan dengan menggunakan media pertemuan, komunikasi yang dijalankan oleh BPBD DIY kepada masyarakat dapat diterima secara langsung serta pesan-pesan yang bersifat persuasif yang disampaikan diharapkan mampu merubah sikap masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi. Barata (2003 : 70) mengatakan bahwa komunikasi persuasif juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan untuk membujuk atau mengajak khalayak atau *audience* bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. Riswandi ( 2009 : 157-158 ) menambahkan bahwa saluran komunikasi personal, baik yang bersifat langsung perseorangan maupun melalui kelompok, lebih

persuasif dibandingkan dengan saluran media massa lain. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor :

- a) Penyampaian pesan melalui saluran komunikasi personal dapat dilakukan secara langsung kepada khalayak yang dituju.
- b) Penyampaian pesan melalui saluran komunikasi personal dapat secara lebih terperinci dan lebih fleksibel disesuaikan dengan situasi.
- c) Keterlibatan khalayak dalam proses komunikasi cukup tinggi.
- d) Komunikator dapat langsung mengetahui reaksi, feedback, tanggapan atas isi pesan yang disampaikan.
- e) Komunikator dapat segera memberi penjelasan apabila terdapat kesalahpahaman atau kesalahan persepsi dari pihak penerima

Secara keseluruhan pemilihan media yang digunakan oleh BPBD dalam upaya penanggulangan dan mitigasi risiko bencana yang ada di DIY belum terlalu maksimal. Dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum tahu tentang media twitter yang digunakan BPBD DIY dalam menyampaikan informasi. Seperti yang dikatakan Bapak Sigit Nur Cahyo sebagai masyarakat DIY yang belum mengetahui media twitter yang digunakan BPBD. Selain itu media baliho BPBD DIY yang terpasangpun perlu dibenahi karena kondisi sudah rusak sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui media baliho tersebut sudah tidak dapat dibaca dengan jelas. Pertimbangan karakteristik media menurut Riswandi (2009 : 160) menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan kebutuhan pemeliharaan memori, jika penyampaian pesan lebih ditunjukkan pada upaya agar pesan-pesan yang disampaikan tetap diingat



dalam kurun waktu yang relatif lebih lama, maka media seperti media luar ruang (billboard, spanduk, poster, dan lain-lain) lebih cocok untuk diterapkan.

e. Mengatur Anggaran

Dalam mengatur anggaran BPBD DIY mendapatkan dana dari APBD DIY yang dibuat oleh pemerintah daerah khususnya DPRD DIY untuk mencanangkan anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan program penanggulangan bencana. Dalam hal ini peneliti melihat anggaran yang dikeluarkan lebih dikhususkan untuk menjalankan program DESTANA dan juga SSB. Namun anggaran biaya untuk program yang sifatnya iklan untuk masyarakat kurang diperhatikan. Seperti pemasangan baliho yang terkendala masalah biaya menjadi satu hal yang perlu dibenahi lebih serius lagi oleh BPBD DIY selaku badan yang menangani masalah bencana. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja seharusnya lebih diperinci untuk melihat seberapa besar anggaran dana yang harus dikeluarkan. Namun yang harus diperhatikan lagi adalah penggunaan anggaran untuk media komunikasi apakah sesuai dengan target khalayak yang ingin dicapai, jangan sampai media yang digunakan tidak sampai kepada target sasaran dan hanya menjadi pemborosan anggaran dana untuk media komunikasi yang digunakan. Seperti yang disampaikan oleh Cangara (2013 : 144) bahwa sebelum membelanjakan dana untuk media, sebaiknya dilakukan survei awal, apakah media itu memiliki daya sebar yang luas, apakah target sasaran memiliki atau berlangganan media yang akan digunakan.

f. Evaluasi hasil kegiatan

Dalam evaluasi kegiatan, BPBD DIY melakukan evaluasi program DESTANA yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat

seberapa besar tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam tahapan evaluasi ini terdapat beberapa ukuran tingkat keberhasilan yaitu tahu, paham, siap, sadar dan juga sudah berbudaya. Ukuran keberhasilan yang diharapkan adalah masyarakat yang ada di daerah rawan bencana sudah berbudaya terhadap ancaman bencana yang akan terjadi sehingga mereka akan bertindak sigap dalam menghadapi bencana. Walaupun menurut Ibu Ade Permata Sari S.T selaku bagian Pencegahan mengungkapkan bahwa belum semua desa yang ada diprogram DESTANA ada pada tahap masyarakat yang sudah berbudaya dikarenakan faktor lingkungan masyarakat itu sendiri dan juga faktor dari BPBD. Maka evaluasi ini kemudian menjadi pembelajaran selanjutnya untuk melaksanakan program ditahun depan karena pelaksanaan program DESTANA dan SSB merupakan program jangka panjang hingga tahun 2022 mendatang.

Peneliti mengungkapkan apa yang dilakukan BPBD DIY dalam tahapan evaluasi sudah sangat tepat, dikarenakan dalam evaluasi program yang dilakukan BPBD DIY melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan hingga apa saja yang perlu diperbaiki untuk melakukan program selanjutnya. Cangara (2013 : 149) menjelaskan evaluasi program memiliki fokus untuk melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari suatu kegiatan dan untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi. Dalam melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Evaluasi Program (*summative evaluation*)

Evaluasi program merupakan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan melihat beberapa fokus yang berkaitan dengan tujuan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh BPBD DIY dalam

mengevaluasi program yang dijalankan dengan melihat ukuran tingkat keberhasilan masyarakat terdampak di daerah rawan bencana.

2) Evaluasi Manajemen (*formative evaluation*)

Evaluasi manajemen adalah evaluasi yang didasari pada fokus pencapaian operasional kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat pada perencanaan kegiatan dan langkah-langkah dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPBD yang berjalan lancar.

**2. Penetapan Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Penetapan strategi komunikasi yang dilakukan BPBD DIY meliputi : penetapan komunikator, menyusun pesan, memproduksi media , penyebar luasan media, pengaruh (*effect*) yang diharapkan, memobilisasi sumber daya luar, penyusunan jadwal kegiatan hingga mempersiapkan tim kerja. Menurut peneliti, yang dilakukan BPBD DIY dalam penetapan strategi komunikasi sudah cukup tepat. Hanya saja *pretesting communication* tidak dilakukan oleh BPBD. *Pretesting communication* atau uji awal materi komunikasi seharusnya menjadi faktor penting yang dilakukan BPBD DIY dalam pengujian awal materi komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas komunikasi yang dilakukan dan juga melihat dampak sosial psikologi terhadap khalayak. Seperti yang dijelaskan oleh Canggara (2013 : 137) bahwa hal yang sering dilupakan dan menjadi kesalahan yang fatal dalam produksi media , ialah ketidakbiasaan melakukan uji awal (*pretesting*) materi komunikasi. Kesalahan ini tidak saja sering dilakukan oleh para perencana, namun juga industri media sering melalaikan hal ini. Canggara juga menambahkan bahwa uji awal dapat dilakukan dengan meminta bantuan ahli dalam bidang komunikasi, psikologi massa, agama, bahasa, dan seni (estetika) untuk melihat sejauh mana *effect* yang dapat

timbul setelah media itu sampai kepada masyarakat. Apakah akan menjadi *effect* yang positif atau malah menjadi *effect* yang negatif.

### **3. Kegiatan Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Kegiatan Manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD DIY meliputi Pencegahan, mitigasi , kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan bencana tersebut dilakukan dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi akibat bencana. Menurut *University of Wisconsin* dalam Khambali (2017 : 49) manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang didesain dalam mengendalikan situasi bencana darurat dan mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana dalam menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dalam kegiatan manajemen penanggulangan bencana sudah tepat dan telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Khambali (2017 : 15-18) yaitu meliputi Pencegahan (*prevention*), Mitigasi bencana (*Mitigation*), Kesiapsiagaan (*preparedness*), Peringatan Dini (*Early warning*), Tanggap darurat (*response*), Bantuan darurat (*Response*), Bantuan Darurat (*Relief*), Pemulihan (*recovery*), Rehabilitasi (*rehabilitation*), dan Rekonstruksi (*Reconstruction*).

### **4. Hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait masalah bencana yang ada di DIY, BPBD dalam membuat suatu program dan mitigasi masalah bencana mempunyai hambatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi jalannya mitigasi dan penanggulangan bencana di DIY. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade

Permata Sari S.T bahwa hambatan yang saat ini dialami adalah belum adanya alat peringatan dini (*Early warning*) untuk bencana gempa bumi. Risiko bencana gempa bumi yang ada di DIY merupakan bencana dengan tingkat kerawanan tinggi dan seluruh wilayah yang ada di DIY merupakan wilayah terpapar bencana gempa bumi. Seharusnya BPBD lebih menekankan pelatihan dan pendidikan terkait bencana gempa bumi. Seperti yang dikatakan Khambali (2017:51-52) mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan pascabencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus dan selalu sejalan dengan penemuan teknologi yang mutakhir. Khambali juga menambahkan sosialisasi selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Tindakan memaksa selayaknya juga diterapkan. Seperti contohnya peringatan melalui pengeras masjid untuk segera melakukan evakuasi, atau memukul kentongan sebagai tanda bencana dapat menjadi peringatan alternatif bagi warga masyarakat.

#### **5. Faktor Pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi risiko bencana gempa bumi di DIY**

Dalam upaya mitigasi risiko bencana yang ada di DIY, BPBD mempunyai beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut meliputi : Peralatan dan transportasi yang mendukung untuk penanganan bencana dan banyaknya anggota atau personil yang berpengalaman dan terlatih terhadap penanganan bencana. Menurut Maarif (2012:92), pada tingkat operasional lapangan pada saat tanggap darurat tantangan utama dari lembaga penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan informasi dan lemahnya komunikasi

Media memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menenangkan masyarakat maupun meresahkan masyarakat. Media dapat menjadi kekuatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

b. Keterbatasan personil dan peralatan

Keterbatasan personil merupakan unsur hambatan dalam menanggulangi bencana. Dimana peran personil adalah bertanggung jawab dalam arti kesiapsiagaan jadi penentuan personil harus sesuai benar dan dengan latihan dasar yang baik Sedangkan peralatan suatu penunjang penting dalam mengatasi bencana.

c. Minimnya sarana dan prasarana transportasi

Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengatasi pada saat terjadi bencana dan sesudah bencana.